



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

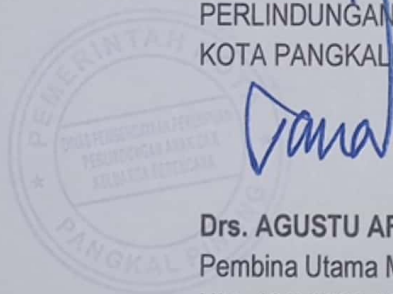
Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Atas tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, April 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAKB TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAKB.....	31
2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DPPPAKB.....	49
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	72
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	73
3.3 Program dan Kegiatan	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	106
BAB V PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C. 29. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2024.....	11
Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	51
Tabel T-C. 32. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPPAB Beserta Target Capaian Tahun 2024-2026.....	89
Tabel T-C. 33. Rumusan Rencana Program Dinas PPPAB Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	87
Tabel T-C. 34. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas PPPAB Tahun 2024.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

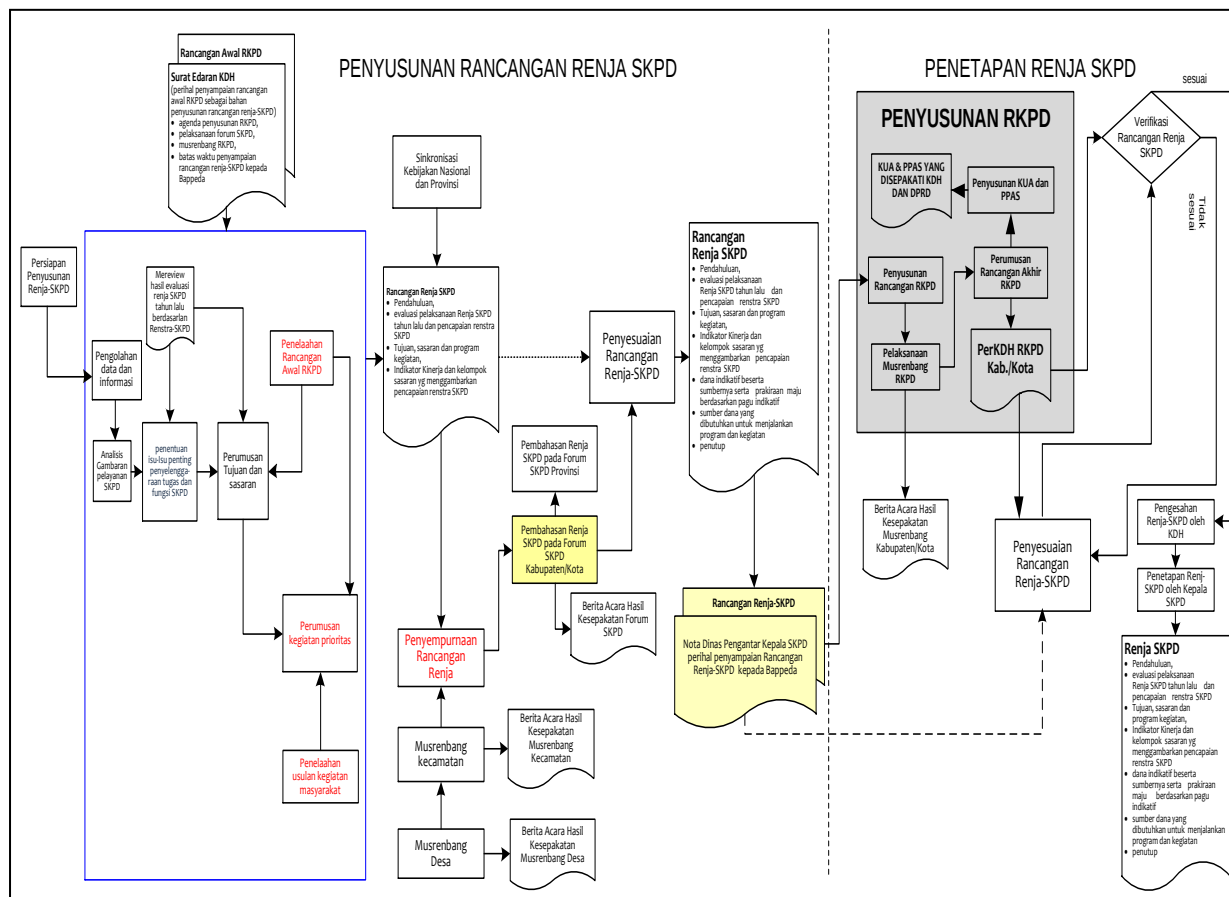
1. Renja DPPPAB Tahun 2025 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) DPPPAB Tahun 2024-2026.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025. Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti Permendagri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang dan Renstra DPPPAB Tahun 2024-2026.
-

Gambar Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga
Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
3. Mewujudkan Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik
Indikator : Persentase Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
Indikator : Persentase Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
 2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
Indikator : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
-

3. Meningkatnya Nilai KLA

Indikator : Predikat Kota Layak Anak

4. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

Indikator : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun

5. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut:

1. Tujuan RPD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing
 Sasaran RPD : Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
2. Tujuan RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik menuju tercapainya Good Governance
 Sasaran RPD : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
-

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 01);
 21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
 22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
 23. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Berita Acara Daerah Tahun 2023 Nomor 148).
-

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan induk tahun 2025, dan tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 sebagai :

1. Perwujudan Tujuan dan Sasaran ke dalam rencana kegiatan pembangunan.
2. Perumuskan program-program prioritas.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja PD dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja PD.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut.

TABEL T-C.29
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	13.420.757.121	0	0	100	4.621.674.894	100	721.525.753	100	1.440.829.229	100	953.253.215	100	1.379.269.928	100	4.494.878.125	100	4.494.878.125	100	33,492	Sekretariat RATNA JUWITA, S.Sos, MM
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat RATNA JUWITA, S.Sos, MM
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat RATNA JUWITA, S.Sos, MM
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat RATNA JUWITA, S.Sos, MM
2		020801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	31.500.000	0	0	7	1.050.000	5	0	5	737.500	6	0	7	296.000	7	1.033.500	7	1.033.500	100	3,281	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP
3		020801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	1	0	2	148.000	2	0	2	0	2	148.000	2	148.000	100	3,289	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP
4		020801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	2	0	2	148.000	2	0	2	0	2	148.000	2	148.000	100	3,289	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP
5		020801201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	0	0	0	0	2	0	2	148.000	2	148.000	2	148.000	100	3,289	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP
6		020801201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	2	0	2	147.000	2	0	2	0	2	147.000	2	147.000	100	3,267	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP
7		020801201005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	0	0	0	0	0	0	2	148.000	2	148.000	2	148.000	100	3,289	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP

8		020801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	2	0	2	146.500	2	0	2	0	2	146.500	2	146.500	100	3,256	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
							I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9		020801201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	3	150.000	3	0	3	148.000	3	0	3	0	3	148.000	3	148.000	100	3,289	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan MIRNA FELIANA, S.IP
10		020801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.830.512.417	0	0	5	3.434.597.660	3	607.277.600	4	1.286.808.781	4	761.546.259	5	733.068.306	5	3.388.700.946	5	3.388.700.946	100	31,288	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan FITRIA, S.E
11		020801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.812.512.417	0	0	30	3.433.547.660	29	607.277.600	30	1.286.104.081	30	761.546.259	30	732.772.806	30	3.387.700.746	30	3.387.700.746	100	31,331	Sub Koordinator Keuangan FITRIA, S.E
12		020801202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	2	250.000	2	0	2	247.200	2	0	2	0	2	247.200	2	247.200	100	5,493	Sub Koordinator Keuangan FITRIA, S.E
13		020801202006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	250.000	2	0	2	216.000	2	0	2	0	2	216.000	2	216.000	100	4,800	Sub Koordinator Keuangan FITRIA, S.E
14		020801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	2	300.000	0	0	1	0	0	0	2	295.500	2	295.500	2	295.500	100	6,567	Sub Koordinator Keuangan FITRIA, S.E
15		020801202008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	250.000	2	0	2	241.500	2	0	2	0	2	241.500	2	241.500	100	5,367	Sub Koordinator Keuangan FITRIA, S.E
16		020801205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	145.000.000	0	0	1	45.259.000	0	0	0	0	0	0	1	44.939.000	1	44.939.000	1	44.939.000	100	30,992	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
17		020801205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	125.000.000	0	0	1	45.259.000	0	0	0	0	0	0	1	44.939.000	1	44.939.000	1	44.939.000	100	35,951	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
18		020801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	377.902.100	0	0	5	256.909.500	0	28.553.710	3	33.141.100	3	66.202.603	5	118.466.711	5	246.364.124	5	246.364.124	100	65,193	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
19		020801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.790.000	0	0	1	7.569.500	1	825.000	1	0	1	0	1	5.724.000	1	6.549.000	1	6.549.000	100	41,476	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
20		020801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	79.500.000	0	0	1	49.200.000	0	0	0	0	1	14.909.000	1	26.800.000	1	41.709.000	1	41.709.000	100	52,464	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
21		020801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	89.461.600	0	0	4	40.066.000	1	12.905.000	2	253.000	2	11.575.000	3	14.014.000	3	38.747.000	3	38.747.000	100	43,311	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
22		020801206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	73.150.500	0	0	1	44.574.000	1	2.718.000	1	7.085.000	1	12.344.000	1	21.780.500	1	43.927.500	1	43.927.500	100	60,051	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP

23		020801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	120.000.000	0	0	1	115.500.000	1	12.105.710	1	25.803.100	1	27.374.603	1	50.148.211	1	115.431.624	1	115.431.624	100	96,193	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
24		020801207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	164.160.000	0	0	2	67.818.000	0	0	0	0	0	0	2	59.798.000	2	59.798.000	2	59.798.000	100	36,427	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
25		020801207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	50.000.000	0	0	0	21.859.000	0	0	0	0	0	0	1	21.609.000	1	21.609.000	1	21.609.000	100	43,218	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
26		020801207010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	10.000.000	0	0	7	45.959.000	0	0	0	0	0	0	7	38.189.000	7	38.189.000	7	38.189.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
27		020801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	1.217.810.204	0	0	3	413.411.648	0	60.425.013	2	92.258.076	2	85.775.681	3	115.274.015	3	353.732.785	3	353.732.785	100	29,047	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
28		020801208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	576.100.000	0	0	1	209.764.260	1	31.939.620	1	58.593.392	1	50.593.392	1	68.637.856	1	209.764.260	1	209.764.260	100	36,411	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
29		020801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	376.813.294	0	0	1	115.000.000	1	17.199.545	1	10.864.912	1	12.365.517	1	15.130.463	1	55.560.437	1	55.560.437	100	14,745	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
30		020801208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	264.896.910	0	0	1	88.647.388	1	11.285.848	1	22.799.772	1	22.816.772	1	31.505.696	1	88.408.088	1	88.408.088	100	33,375	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
31		020801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	653.872.400	0	0	4	402.629.086	4	25.269.430	4	27.883.772	1	39.728.672	4	307.427.896	4	400.309.770	4	400.309.770	100	61,221	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
32		020801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	150.464.000	0	0	1	50.330.096	1	10.568.616	1	9.782.924	3	12.217.824	1	17.747.232	1	50.316.596	1	50.316.596	100	33,441	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
33		020801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	385.410.000	0	0	5	114.489.094	3	11.322.198	3	12.532.924	3	21.442.924	5	68.050.432	5	113.348.478	5	113.348.478	100	29,410	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
34		020801209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	15.000.000	0	0	62	30.989.200	0	0	0	0	4	1.000.000	62	29.989.000	62	30.989.000	62	30.989.000	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
35		020801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	102.998.400	0	0	2	206.820.696	1	3.378.616	1	5.567.924	1	5.067.924	2	191.641.232	2	205.655.696	2	205.655.696	100	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Supriati, S.AP
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	33,492	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
36	-	020802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase ARG pada belanja langsung (Dengan Satuan:%)	0,880	325.000.000	0	0	0,880	402.933.800	0,220	0	0,440	0	0,660	1.744.500	2,400	356.456.990	2,400	358.201.490	2,400	358.201.490	100	100	Bidang PPA SHERLY OKVITARIA, S.Sos

37		020802201	P e l e m b a g a a n P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r (PUG) p a d a L e m b a g a P e m e r i n t a h K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	70.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	1.744.500	1	1.540.000	1	3.284.500	1	3.284.500	100	4,692	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , P e m b a n g u n a n d a n P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r S U T R I A N I , S . S T
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
38		020802201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	70.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	1.744.500	1	1.540.000	1	3.284.500	1	3.284.500	100	4,692	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , P e m b a n g u n a n d a n P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r S U T R I A N I , S . S T
39		020802202	P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n B i d a n g P o l i t i k , H u k u m , S o s i a l , d a n E k o n o m i p a d a O r g a n i s a s i K e m a s y a r a k a t a n K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	255.000.000	0	0	2	392.933.800	0	0	0	0	0	0	2	354.916.990	2	354.916.990	2	354.916.990	100	100	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , P e m b a n g u n a n d a n P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r S U T R I A N I , S . S T
40		020802202001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	80.000.000	0	0	1	96.650.000	0	0	0	0	0	0	1	92.028.000	1	92.028.000	1	92.028.000	100	100	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , P e m b a n g u n a n d a n P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r S U T R I A N I , S . S T
41		020802202002	Advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n P e n i n g k a t a n P a r t i s i p a s i P e r e m p u a n d a n P o l i t i k , H u k u m , S o s i a l d a n E k o n o m i	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Organisasi)	0	175.000.000	0	0	30	296.283.800	0	0	0	0	0	0	30	262.888.990	30	262.888.990	30	262.888.990	100	100	Sub Koordinator P e n g k a j i a n , P e m b a n g u n a n d a n P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r S U T R I A N I , S . S T
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		
42	-	020803	P R O G R A M P E R L I N D U N G A N P E R E M P U A N	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (Dengan Satuan:%)	0,026	362.300.000	0	0	0,026	141.669.796	0,006	21.944.916	0,013	6.067.924	0,019	5.067.924	0,080	62.922.232	0,080	96.002.996	0,080	96.002.996	100	26,498	Bidang PPA SHERLY OKVITARIA, S.Sos
43		020803201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	312.300.000	0	0	1	41.670.046	1	21.944.916	1	6.067.924	1	5.067.924	1	7.933.232	1	41.013.996	1	41.013.996	100	13,133	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n M U A R O F A H , S.Sos
44		020803201002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	312.300.000	0	0	33	41.670.046	33	21.944.916	33	6.067.924	33	5.067.924	33	7.933.232	33	41.013.996	33	41.013.996	100	13,133	Sub Koordinator P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n M U A R O F A H , S.Sos
45		020803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	50.000.000	0	0	2	99.999.750	0	0	0	0	0	0	2	54.989.000	2	54.989.000	2	54.989.000	100	100	MERYANCE, SE Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

46		020803202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan (Dengan Satuan:Orang)	0	50.000.000	0	0	20	50.000.000	0	0	0	0	0	0	20	22.837.000	20	22.837.000	20	22.837.000	100	45,674	MERYANCE, SE Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
47		020803202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Layanan)	0	0	0	0	20	49.999.750	0	0	0	0	0	0	20	32.152.000	20	32.152.000	20	32.152.000	100	100	MERYANCE, SE Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	26,498	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
48	-	020805	P R O G R A M PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Dengan Satuan:%)	13	153.385.589	0	0	13	26.205.500	0	0	0	1.064.500	6,900	1.640.000	6,890	21.050.500	6,890	23.755.000	6,890	23.755.000	53	15,487	Bidang PPA SHERLY OKVITARIA, S.Sos
49		020805201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	153.385.589	0	0	1	26.205.500	0	0	0	1.064.500	1	1.640.000	1	21.050.500	1	23.755.000	1	23.755.000	100	15,487	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender SUTRIANI, S.ST
50		020805201001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	0	153.385.589	0	0	1	26.205.500	0	0	0	1.064.500	1	1.640.000	1	21.050.500	1	23.755.000	1	23.755.000	100	15,487	Sub Koordinator Pengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender SUTRIANI, S.ST
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							53,000	15,487	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
51	-	020806	P R O G R A M PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota (Dengan Satuan:%)	100	474.870.000	0	0	100	137.771.916	25	7.378.616	50	21.699.924	75	8.567.924	100	87.642.232	100	125.288.696	100	125.288.696	100	26,384	Bidang PPA SHERLY OKVITARIA, S.Sos
52		020806201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	414.870.000	0	0	2	107.771.916	0	4.378.616	1	16.225.924	2	6.567.924	2	72.552.232	2	99.724.696	2	99.724.696	100	24,038	Reni Husnita, S.E Sub Koordinator Perlindungan Anak
53		020806201001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Dengan Satuan:Organisasi/ lembaga)	0	194.870.000	0	0	20	70.500.220	20	0	20	8.658.000	20	0	20	54.575.000	20	63.233.000	20	63.233.000	100	32,449	Reni Husnita, S.E Sub Koordinator Perlindungan Anak
54		020806201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	220.000.000	0	0	1	37.271.696	0	4.378.616	1	7.567.924	1	6.567.924	1	17.977.232	1	36.491.696	1	36.491.696	100	16,587	Reni Husnita, S.E Sub Koordinator Perlindungan Anak

55		020806202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	60.000.000	0	0	1	30.000.000	0	3.000.000	0	5.474.000	1	2.000.000	1	15.090.000	1	25.564.000	1	25.564.000	100	42,607	Reni Husnita, S.E Sub Koordinator Perlindungan Anak
56		020806202003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	0	60.000.000	0	0	1	30.000.000	0	3.000.000	0	5.474.000	0	2.000.000	1	15.090.000	1	25.564.000	1	25.564.000	100	42,607	Reni Husnita, S.E Sub Koordinator Perlindungan Anak
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	26,384	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
57	-	021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertlity Rate) (Dengan Satuan:Rata-Rata Anak per Wanita)	1,650	125.870.000	0	0	1,650	155.400.000	0	0	0	0	0	0	2,260	151.882.510	2,260	151.882.510	2,260	151.882.510	100	100	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan MASNATI, S.P
58		021402202	Pemetaan Perkiraan Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pendudukan Penduduk Cakupan Daerah Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	125.870.000	0	0	3	155.400.000	0	0	0	0	0	0	3	151.882.510	3	151.882.510	3	151.882.510	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ERWAN ALFANO, SKM
59		021402202009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	64.200.000	0	0	0	0	0	0	1	62.827.150	1	62.827.150	1	62.827.150	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ERWAN ALFANO, SKM
60		021402202012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	125.870.000	0	0	1	49.200.000	0	0	0	0	0	0	1	48.940.000	1	48.940.000	1	48.940.000	100	38,881	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB EMILIA, SKM
61		021402202013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	42.000.000	0	0	0	0	0	0	1	40.115.360	1	40.115.360	1	40.115.360	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ERWAN ALFANO, SKM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	
62	-	021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin (Dengan Satuan:%)	82	3.017.885.589	0	0	82	2.524.692.544	20,500	53.050.624	41	92.700.936	61,500	175.520.936	66,820	2.092.537.473	66,820	2.413.809.969	66,820	2.413.809.969	81,488	79,983	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dra. YULISTINA
				Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode mode (Dengan Satuan:%)	79,940		0		79,940		19,980		39,970		59,950		66,020		66,020		66,020		82,587		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dra. YULISTINA
63		021403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	0	85.000.000	0	0	5	738.050.000	0	0	0	0	0	0	5	701.965.000	5	701.965.000	5	701.965.000	100	100	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB EMILIA, SKM

64		021403201001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Dengan Satuan:Organisasi)	0	0	0	0	8	80.000.000	0	0	0	0	0	0	8	73.800.000	8	73.800.000	8	73.800.000	100	100	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB EMILIA, SKM										
65		021403201004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	85.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	1	133.370.000	1	133.370.000	1	133.370.000	100	100	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga ERWAN ALFANO, SKM										
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab												
									I		II		III		IV																				
									1	2	3	4	5	6	K	Rp	7	K	Rp	8	K	Rp		9	K	Rp	10	K	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp
66		021403201006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok) (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	91.000.000	0	0	0	0	0	0	1	87.500.000	1	87.500.000	1	87.500.000	100	100	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB EMILIA, SKM										
67		021403201007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	337.050.000	0	0	0	0	0	0	1	333.845.000	1	333.845.000	1	333.845.000	100	100	Megawati, AMK Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB										
68		021403201008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	1	73.450.000	1	73.450.000	1	73.450.000	100	100	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB EMILIA, SKM										
69		021403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (Dengan Satuan:Laporan)	0	426.600.000	0	0	2	860.048.800	0	0	0	0	0	0	2	850.713.800	2	850.713.800	2	850.713.800	100	100	Megawati, AMK Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB										
70		021403202001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Dengan Satuan:Organisasi)	0	110.000.000	0	0	6	34.000.000	0	0	0	0	0	0	6	33.740.000	6	33.740.000	6	33.740.000	100	30,673	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB EMILIA, SKM										
71		021403202004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dengan Satuan:Orang)	0	316.600.000	0	0	398	826.048.800	0	0	0	0	0	0	398	816.973.800	398	816.973.800	398	816.973.800	100	100	Sub Koordinator Pembinaan dan Kesertaan ber-KB EMILIA, SKM										
72		021403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.506.285.589	0	0	4	731.593.744	0	53.050.624	0	92.700.936	1	175.520.936	4	344.903.673	4	666.176.169	4	666.176.169	100	26,580	ERNA, SKM										
73		021403203001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	18.000.000	0	0	0	0	0	0	1	15.920.000	1	15.920.000	1	15.920.000	100	100	ERNA, SKM										

82		021-404201002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Unit)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Unit)	0		0	0	0	20	1.360.000.000	0	0	0	0	0	0	246	961.947.000	246	961.947.000	246	961.947.000	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DWIDY SUTIASMI, S.E
83		021-404201005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Orang)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Orang)	0		0	0	0	438	919.800.000	0	0	0	0	0	0	438	918.258.800	438	918.258.800	438	918.258.800	100	100	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DWIDY SUTIASMI, S.E
84		021-404201008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga). (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga). (Dengan Satuan:Laporan)	0	319.882.500	0	0	1	34.600.000	1	22.698.000	1	10.900.000	1	1.000.000	1	0	1	34.598.000	1	34.598.000	100	10,816	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DWIDY SUTIASMI, S.E	
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
									I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
85		021-404202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.290.487.650	0	0	4	1.383.416.784	1	128.438.664	1	289.687.463	1	82.656.296	4	833.652.371	4	1.334.434.794	4	1.334.434.794	100	31,102	Mardianty, AMK Sub Koordinator Lembaga Pengembangan dan Kerja Sama	
86		021-404202001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Organisasi)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Organisasi)	0	1.083.529.000	0	0	1	387.116.784	1	16.014.464	1	205.212.463	1	39.981.296	1	121.127.371	1	382.335.594	1	382.335.594	100	35,286	Mardianty, AMK Sub Koordinator Lembaga Pengembangan dan Kerja Sama	
87		021-404202002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Laporan)	0	940.416.000	0	0	1	208.100.000	0	0	0	3.375.000	0	16.800.000	1	186.325.000	1	206.500.000	1	206.500.000	100	21,958	Lilis Suryani, S.E Sub Koordinator Penataan dan Penguatan	
88		021-404202003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Organisasi)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Organisasi)	0	1.940.881.250	0	0	1	722.500.000	1	70.525.000	1	59.300.000	1	23.875.000	1	526.200.000	1	679.900.000	1	679.900.000	100	35,030	Lilis Suryani, S.E Sub Koordinator Penataan dan Penguatan	
89		021-404202004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Dengan Satuan:Laporan)	0	325.661.400	0	0	1	65.700.000	1	41.899.200	1	21.800.000	1	2.000.000	1	0	1	65.699.200	1	65.699.200	100	20,174	Lilis Suryani, S.E Sub Koordinator Penataan dan Penguatan	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				100,000	70,477	
PREDIKAT KINERJA				ST	S	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)				93,621	56,540	
PREDIKAT KINERJA				ST	R	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- Komitmen pimpinan dalam pelaksana kegiatan					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- Ada beberapa indikator program yang datanya berkaitan dengan OPD lain sehingga dalam perhitungan capaian kinerja sedikit terhambat. - Waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. - Penentuan target belum optimal					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	- Waktu pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. - Lebih cepat melaksanakan permintaan data kepada OPD terkait yang diperlukan untuk perhitungan capaian kinerja.					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	- Target harus ditentukan secara optimal.					

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan KB Kota Pangkalpinang Tahun 2024**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		020801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	0	12.847.597.121	0	0	67	4.771.503.328	0	1.003.306.219	74,300	1.334.404.963	0	0	0	0	74,300	2.337.711.182	74,300	2.337.711.182	100	18,196	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	0		0		85		0		0		0		0			0			0		Sekretariat
2		020801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan: %)	0	0	0	0	100	3.727.850	25	0	100	1.784.050	0	0	0	0	100	1.784.050	100	1.784.050	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
3		020801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	2	533.800	1	0	1	180.000	0	0	0	0	1	180.000	1	180.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
4		020801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	1	506.450	1	0	1	506.450	0	0	0	0	1	506.450	1	506.450	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
5		020801201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	1	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6		020801201004	Koordinasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	1	560.000	1	0	1	560.000	0	0	0	0	1	560.000	1	560.000	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
7		020801201005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	0	0	0	0	1	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R P	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	
8		020801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	537.600	4	0	4	537.600	0	0	0	0	4	537.600	4	537.600	100	100	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
9		020801201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	505.000	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
10		020801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	10.812.512.417	0	0	100	3.801.298.784	25	801.693.695	100	1.098.720.803	0	0	0	0	100	1.900.414.498	100	1.900.414.498	100	17,576	Sub Koordinator Keuangan
11		020801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.812.512.417	0	0	35	3.800.233.784	30	801.693.695	30	1.098.160.803	0	0	0	0	30	1.899.854.498	30	1.899.854.498	100	17,571	Sub Koordinator Keuangan
12		020801202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	560.000	4	0	4	560.000	0	0	0	0	4	560.000	4	560.000	100	100	Sub Koordinator Keuangan
13		020801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	505.000	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Sub Koordinator Keuangan
14		020801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	0	178.402.100	0	0	100	230.103.550	0	57.492.367	100	67.969.505	0	0	0	0	100	125.461.872	100	125.461.872	100	70,325	Sub Bagian Umum danKepegawaian
15		020801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.790.000	0	0	1	10.452.800	0	0	1	7.937.650	0	0	0	0	1	7.937.650	1	7.937.650	100	50,270	Sub Bagian Umum danKepegawaian
16		020801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	20.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian
17		020801206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantanahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	
18		020801206004	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	89.461.600	0	0	2	39.998.750	0	0	2	20.314.900	0	0	0	0	2	20.314.900	2	20.314.900	100	22,708	Sub Bagian Umum danKepegawalan
19		020801206005	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	0	73.150.500	0	0	2	30.840.000	0	10.962.750	1	430.000	0	0	0	0	1	11.392.750	1	11.392.750	100	15,574	Sub Bagian Umum danKepegawalan
20		020801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	0	0	0	0	1	127.959.000	0	46.529.617	0	39.286.955	0	0	0	0	0	85.816.572	0	85.816.572	0	100	Sub Bagian Umum danKepegawalan
21		020801207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawalan
22		020801207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	13	459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawalan
23		020801207006	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumbuh Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	2	459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawalan
24		020801207010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	4	459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawalan
25		020801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.217.810.204	0	0	100	468.096.752	0	97.259.416	100	75.642.673	0	0	0	0	100	172.902.089	100	172.902.089	100	14,198	Sub Bagian Umum danKepegawalan
26		020801208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumbuh Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	576.100.000	0	0	4	215.452.568	1	51.475.468	2	30.450.312	0	0	0	0	2	81.925.780	2	81.925.780	100	14,221	Sub Bagian Umum danKepegawalan
27		020801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumbuh Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	376.813.294	0	0	4	130.459.000	1	13.794.328	2	14.116.569	0	0	0	0	2	27.910.897	2	27.910.897	100	7,407	Sub Bagian Umum danKepegawalan
28		020801208004	Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	264.896.910	0	0	4	122.185.184	1	31.989.620	2	31.075.792	0	0	0	0	2	63.065.412	2	63.065.412	100	23,808	Sub Bagian Umum danKepegawalan
29		020801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondsi Baik (Dengan Satuan:%)	0	638.872.400	0	0	100	266.899.392	0	46.860.741	100	90.287.932	0	0	0	0	100	137.148.673	100	137.148.673	100	21,467	Sub Bagian Umum danKepegawalan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantanahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R P	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	Rp	
30		020801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	150.464.000	0	0	1	52.090.696	0	12.232.924	1	7.738.616	0	0	0	0	1	19.971.540	1	19.971.540	100	13,273	Sub Bagian Umum danKepegawaian
31		020801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	385.410.000	0	0	5	112.349.696	0	28.559.893	5	13.033.300	0	0	0	0	5	41.593.193	5	41.593.193	100	10,792	Sub Bagian Umum danKepegawaian
32		020801209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	88	30.459.000	0	0	44	16.028.400	0	0	0	0	44	16.028.400	44	16.028.400	100	100	Sub Bagian Umum danKepegawaian
33		020801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	102.998.400	0	0	1	72.000.000	0	6.067.924	1	53.487.616	0	0	0	0	1	59.555.540	1	59.555.540	100	57,822	Sub Bagian Umum danKepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							50,000	18,196	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
34		020802	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	2,400	34.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PPA
35		020802201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	13	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub KoordinatorPengkajian Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
36		020802201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub KoordinatorPengkajian Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender
37		020802202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	4.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub KoordinatorPengkajian Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantanahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R P	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R P	K	Rp	
38		020802.202002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Organisasi)	0	0	0	0	30	4.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub KoordinatorPengkajian, Pengembangan dan Pengarusutamaan Gender	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						0,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																						SR	SR		
39		020803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (Dengan Satuan:%)	0,026	677.915.000	0	0	0,029	228.858.196	0	9.811.000	0	0	0	0	0	0	0	9.811.000	0	9.811.000	0	1,447	Bidang PPA
40		020803201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Dengan Satuan:Media)	0	312.300.000	0	0	2	35.722.196	0	9.811.000	0	0	0	0	0	0	9.811.000	0	9.811.000	0	3,142	Sub KoordinatorPemberdayaan Perempuan	
41		020803201002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	312.300.000	0	0	33	35.722.196	0	9.811.000	34	0	0	0	0	34	9.811.000	34	9.811.000	100	3,142	Sub KoordinatorPemberdayaan Perempuan	
42		020803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan KorbanKekerasan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	0	365.615.000	0	0	100	175.536.000	0	0	30	0	0	0	0	30	0	30	0	100	0	Kepala	
43		020803202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	16	24.736.000	0	0	30	0	0	0	0	30	0	30	0	100	0	Kepala	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantanahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R P	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	Rp	
44		020803202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Layanan)	0	365.615.000	0	0	16	150.800.000	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	100	0	Kepala
45		020803203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan (Dengan Satuan:organisasi)	0	0	0	0	20	17.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub KoordinatorPemberdayaan Perempuan
46		020803203004	Penguatan Jejaring antarLembaga PenyediaLayanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	17.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub KoordinatorPemberdayaan Perempuan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	1,447	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
47		020806	PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA)	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	30	71.059.096	0	7.567.924	0	0	0	0	0	0	0	7.567.924	0	7.567.924	0	100	Bidang PPA
48		020806201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan U s a h a K e w e n a n g a n Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak (Dengan Satuan: Lembaga)	0	0	0	0	20	71.059.096	0	7.567.924	0	0	0	0	0	0	0	7.567.924	0	7.567.924	0	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak
49		020806201001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media danDunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Dengan Satuan:Organisasi)	0	0	0	0	20	21.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
50		020806201002	Koordinasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	49.999.096	0	7.567.924	0	0	0	0	0	0	0	7.567.924	0	7.567.924	0	100	Sub Koordinator Perlindungan Anak

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantanahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R P	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						0,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						S R	S T		
51		-	020807	PRO GRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0,410	175.470.250	0	0	0,010	0	0	0	0	0,010	0	0,010	0	100	0	Bidang PPA
52			020807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	175.470.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Perlindungan Anak
53			020807202001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	29	24.670.250	0	0	8	0	0	0	0	8	0	8	0	100	0	Kepala
54			020807202006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	29	150.800.000	0	0	8	0	0	0	0	8	0	8	0	100	0	Kepala
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																						S T	S R		
55		-	021304	PRO GRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	42.610.000	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
56			021304201	Pembinaan	Persentase Kelurahan Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	42.610.000	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
57			021304201018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	42.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																						S T	S R		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantanahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
											I		II		III		IV												
											9		10		11		12									13		14	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16				
					K	R P	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp	K	R P	K	R P	K	R P					
58	-	021305	P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N L E M B A G A K E M A S Y A R A K A T A N L E M B A G A A D A T D A N M A S Y A R A K A T H U K U M A D A T	Persentase LKK Aktif (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	857.250.074	0	28.021.696	100	0	0	0	0	0	0	100	28.021.696	100	28.021.696	100	100	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
59		021305201	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKK Yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	857.250.074	0	28.021.696	100	0	0	0	0	0	0	100	28.021.696	100	28.021.696	100	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat			
60		021305201003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	0	0	252	36.967.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Kelembagaan, Perimbangan dan Kerjasama				
61		021305201006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	32.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat			
62		021305201009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	787.797.624	0	28.021.696	0	0	0	0	0	0	0	0	28.021.696	0	28.021.696	0	100	Sub Koordinator Penataan dan Penguatan Masyarakat			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																								100,000	100,000				
PREDIKAT KINERJA																											S T	S T	
63	-	021402	P R O G R A M P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	35.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang PengendalianPenduduk, Penyuluhan dan Penggerakan			

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	
64		021402201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
65		021402201023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	0	0	0	1	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
66		021402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
67		02140220202	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
68		021403	PROGRAM PEMBINAAN K E L U A R G A B E R E N C A N A (KB)	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat D a e r a h K B u n t u k P e r e n c a n a a n	0	3.024.385.000	0	0	100	1.425.628.688	0	97.730.936	100	0	0	0	0	0	100	97.730.936	100	97.730.936	100	3.231	Bidang Keluarga B e r e n c a n a , K e t a h a n a n
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR) (Dengan Satuan: %)	0		0		78		0		66,450		0		0	66,450		66,450			100		Bidang Keluarga B e r e n c a n a , K e t a h a n a n
				Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 (Dengan Satuan:Kelahiran)	0		0		8,230		0		0		0		0		0		0		0		Bidang Keluarga B e r e n c a n a , K e t a h a n a n
				Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Dengan Satuan:WUS)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Bidang Keluarga B e r e n c a n a , K e t a h a n a n

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulantahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	R p	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) (Dengan Satuan:%)	0		0		7,620		0		7,890		0		0		7,890		7,890		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan
69		021403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	606.479.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum danKepegawaian
70		021403201010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan HasilPengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	606.479.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
71		021403203	Pengendalian danPendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Dengan Satuan:%)	0	2.675.505.000	0	0	18,920	819.148.838	0	97.730.936	0	0	0	0	0	0	0	97.730.936	0	97.730.936	0	3,653	Sub Koordinator Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
72		021403203006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dengan Satuan:Unit)	0	2.357.900.000	0	0	7	734.149.788	0	97.730.936	0	0	0	0	0	0	0	97.730.936	0	97.730.936	0	4,145	Sub Bagian Umum danKepegawaian
73		021403203011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	7	84.999.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ERNA, SKM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							60,000	3,231	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
74		021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan (Dengan Satuan:%)	100	4.610.370.150	0	0	100	60.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		12		0		0		12		12		100		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, danSub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerahpada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PerangkatDaerah sampai dengan Renja PerangkatDaerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 (Satuan Indikator)		Realisasi Kinerja Pada Triwulantahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerahyang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
											K	R P	K	R P	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi danKonseling Remaja/Mahasiswa (Dengan Satuan:%)	0		0		66,660		0		88		0		0		88		88		100		Bidang KeluargaBe rencana, Ketahanan
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Dengan Satuan:%)	0		0		83,720		0		12		0		0		12		12		100		Bidang KeluargaBe rencana, Ketahanan
75		021404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (Dengan Satuan:Rata-rata usia kawin)	0	319.882.500	0	0	21,100	60.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
76		021404201008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Dengan Satuan:Laporan)	0	319.882.500	0	0	1	60.966.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						75,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																							S	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																							55,556	22,287	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Adanya Komitmen Pegawai untuk melaksanakan Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Ada Beberapa Indikator Program yang Belum bisa dihitung dikarenakan perhitungan dilakukan pada Akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan																					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sesuai tabel berikut ini :

A. Capaian Kinerja 2023

Capaian Indikator Sasaran IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/Program dan Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Indikator Kinerja
Menurunnya Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Rasio Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO	0,026 (%)	0,063 (%)	<50 (%)
Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	59 (Indeks)	61,05 (Indeks)	103,47 (%)
Meningkatnya Perempuan Sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial (Non Pemerintah)	Persentase Perempuan Sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial (Non Pemerintah)	57,06 (%)	56,14 (%)	98,39 (%)
Meningkatnya jumlah pekerja perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda)	Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda)	45,40 (%)	42,88 (%)	94,45 (%)

Pada Tabel Capaian Kinerja IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dari ke 4 (empat) sasaran DPPPAKB Tahun 2023, ada 1 (satu) indikator telah melebihi target dengan kategori kriteria penilaian realisasi kinerja baik sekali, 2 (dua) indikator belum mencapai target akan tetapi kategori kriteria penilaian realisasi kinerja baik karena tingkat capaian indikator kinerja lebih dari 90% dan 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target dengan kategori kriteria penilaian realisasi kinerja kurang.

1 (satu) indikator telah melebihi target dengan kategori kriteria penilaian realisasi kinerja baik sekali yaitu:

1. Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga dengan Indikator Indeks Pembangunan Keluarga.

Target Indeks Pembangunan Keluarga Kota Pangkalpinang Tahun 2023 yaitu 59 dengan realisasi 61,05 sehingga capaian indikator kinerja 103,47%.

Indeks Pembangunan Keluarga terdiri dari 3 dimensi yaitu:

- a. Dimensi Ketentraman dengan capaian 63,44
- b. Dimensi Kemandirian dengan capaian 48,43
- c. Dimensi Kebahagiaan dengan capaian 71,27

Sehingga dari perhitungan ke 3 (tiga) Indeks tersebut didapatkan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Pangkalpinang yaitu 61,05.

2 (dua) indikator belum mencapai target akan tetapi kategori kriteria penilaian realisasi kinerja baik karena tingkat capaian indikator kinerja lebih dari 90% yaitu :

1. Meningkatnya Perempuan sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial Non Pemerintah dengan Indikator Persentase Perempuan sebagai sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial Non Pemerintah dengan rumus Jumlah Perempuan sebagai Profesional, Teknisi dan Manajerial Non Pemerintah: $\text{Jumlah pekerja perempuan} \times 100$.

Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 57,06% dengan realisasi 56,14 % sehingga capaian indikatornya 98,39%. Dengan rincian jumlah perempuan sebagai professional, Teknisi dan manajerial (Non Pemerintah) pada Tahun 2023 sebanyak 10.602 Orang dan Jumlah pekerja perempuan sebanyak 18.883 Orang sehingga didapatkan realisasi sebesar 56,14%.

2. Meningkatnya jumlah pekerja perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda) dengan indikator Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda) dengan rumus Jumlah Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda) : $\text{Jumlah ASN yang duduk dalam Jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda)} \times 100$.

Target Tahun 2023 yaitu 45,40% dengan realisasi 42,88% sehingga capaian indikator kinerja 94,45%.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, Jumlah Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda) pada Tahun 2023 sebanyak 211 Orang. Untuk jumlah ASN yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda) sebanyak 492 Orang sehingga didapatkan realisasi 42,88%.

1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang tidak mencapai target dengan kategori kriteria penilaian realisasi kinerja kurang sebagai berikut :

1. Menurunnya Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan indikator Rasio Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO dengan rumus/formula Total perempuan dan anak yang mengalami kekerasan: jumlah perempuan x 100. Target Tahun 2023 yaitu 0,026% dengan realisasi 0,063% sehingga capaian indikator kinerja < 50%.

Pada Tahun 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami banyak peningkatan. Berdasarkan data, bahwa ada 50 orang perempuan dewasa dan 23 anak perempuan yang mengalami kekerasan sehingga totalnya ada 73 orang. Untuk jumlah perempuan berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester 1 Tahun 2023 sebanyak 115.206 Jiwa. Sehingga didapatkan Rasio Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO pada Tahun 2023 sebesar 0,063 %.

**Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator /Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Indikator Kinerja
Meningkatnya Persentase ARG pada belanja langsung	Persentase ARG pada Belanja Langsung	(%)	0,88	2,4	272,73
Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	(Dokumen)	1	1	100
Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Laporan)	2	2	100
Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Dokumen)	1	1	100
Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Organisasi)	30	30	100
Menurunnya Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	(%)	0,026	0,080	<50

Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	(Perangkat Daerah)	33	33	100
Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Laporan)	2	2	100
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	(Orang)	20	20	100
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Layanan)	20	20	100
Terlaksananya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pengembangan Forum anak Skala Kota	(%)	100	100	100
Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	(Laporan)	2	2	100
Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	(Organisasi /lembaga)	20	20	100
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(Dokumen)	1	1	100

Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(Laporan)	1	1	100
Tersedianya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(Dokumen)	1	1	100
Meningkatnya Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	(%)	13	6,89	53
Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Laporan)	1	1	100
Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	(Dokumen)	1	1	100
Terpenuhinya Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	(%)	100	100	100
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Laporan)	7	7	100
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dokumen)	2	2	100
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dokumen)	2	2	100
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Dokumen)	2	2	100

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(Dokumen)	2	2	100
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(Dokumen)	2	2	100
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Laporan)	2	2	100
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Laporan)	3	3	100
Terwujudnya ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/ Kualifikasi pada Unit Kerjanya	(%)	100	100	100
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(laporan)	1	1	100
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	(paket)	1	1	100
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Laporan)	5	5	100
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Orang)	30	30	100
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Laporan)	2	2	100
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	(Dokumen)	2	2	100

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(Laporan)	2	2	100
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Dokumen)	2	2	100
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	(%)	100	100	100
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Laporan)	5	5	100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	(Paket)	1	1	100
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	(Paket)	1	1	100
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Paket)	4	3	75
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(Paket)	1	1	100
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Laporan)	1	1	100
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	(%)	100	100	100

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Laporan)	2	2	100
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(Paket)	1	1	100
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	(Unit)	7	7	100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Laporan)	3	3	100
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Laporan)	1	1	100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Laporan)	1	1	100
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Laporan)	4	4	100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	(Unit)	1	1	100
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Unit)	5	5	100
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Unit)	62	62	100

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(Unit)	2	2	100
Menurunnya Angka TFR (Total Fertility Rate)	TFR (Total Fertility Rate)	(Rata-rata anak per wanita)	1,65	2,26	63,03
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Laporan	3	3	100
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	(Dokumen)	1	1	100
Meningkatnya Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	(%)	82	66,82	81,49
Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	(Laporan)	5	5	100
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	(Organisasi)	8	8	100

Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Dokumen)	1	1	100
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	(Laporan)	1	1	100
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	(Laporan)	1	1	100
Meningkatnya Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	(%)	79,94	66,02	82,59
Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB	(PKB/ PLKB)	2	2	100
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	(Organisasi)	6	6	100

Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan(IMP)	(Orang)	398	398	100
Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	(Laporan)	4	4	100
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(Laporan)	1	1	100
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	(Orang)	380	379	99,74
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	(Unit)	8	8	100
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	JumlahLaporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(Laporan)	2	2	100
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	(Dokumen)	1	1	100
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	(Kampung)	12	12	100

Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Angka Kelahiran remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	(Kelahiran per 1000 WUS)	8,17	15,55	<50
Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(Laporan)	3	3	100
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(Unit)	257	246	95,72
Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(Orang)	438	438	100
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	(%)	100	100	100
Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	(Laporan)	4	4	100

Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(Organisasi)	1	1	100
Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(Laporan)	1	1	100
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	(Organisasi)	1	1	100
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	(Laporan)	1	1	100

Indikator Kinerja Program yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebanyak 14 (Empat Belas) Indikator. Dari 14 (Empat Belas) Indikator Program ada 1 (satu) indikator yang melebihi target, 7 (tujuh) indikator yang sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan 6 (enam) indikator yang belum mencapai target. Adapun rincian indikator program sebagai berikut :

- A. Indikator program yang melebihi target dengan capaian kinerja baik sekali ($>100\%$) sebagai berikut:
1. Persentase ARG pada Belanja Langsung dengan Target 2023 0,88 % dengan realisasi 2,4% dengan capaian kinerja 272,73%.
- B. Indikator Program yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja baik (100%) sebagai berikut :
1. Persentase pengembangan forum anak skala kota dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
 2. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
 3. Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/ Kualifikasi pada Unit Kerjanya dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%
 4. Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
 5. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
 6. Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pembangunan dengan Target 100% dan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%.
- C. Indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan tetapi capaian kinerjanya baik ($>75\%$) adalah:
1. Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan target 82% dan realisasi 66,82% sehingga capaian kinerjanya 81,49%.
 2. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan Target 79,94% dan realisasi 66,02% sehingga capaian kinerjanya 82,59%.
- D. Indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja cukup (55%-74%) sebagai berikut:
1. TFR (Total Fertility Rate). Target Tahun 2023 1,65 Rata-rata anak per Wanita dan realisasi 2,26 Rata-rata anak per Wanita dengan capaian kinerja 63,03%.

E. Indikator program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja kurang (<50%) sebagai berikut:

1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (Umur 15-64) Tahun mengalami kekerasan (Fisik, Seksual atau Emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Target Tahun 2023 0,026% dan realisasi 0,080% dengan capaian kinerja <50%.
2. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Target Tahun 2023 13% dan realisasi 6,89% dengan capaian kinerja 53%.
3. Angka Kelahiran remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19). Target Tahun 2023 8,17 Kelahiran per 1000 WUS dan realisasi 15,55 Kelahiran per 1000 WUS dengan capaian kinerja <50%.

Selanjutnya Indikator kinerja kegiatan Tahun 2023 ada 21 (Dua Puluh) Indikator Kegiatan. Dari 21 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Kegiatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan kinerja Baik (100%). Adapun Rinciannya sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Jumlah Laporan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
7. Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
9. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
10. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
11. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

12. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
14. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
15. Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota.
16. Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
17. Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB.
18. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
19. Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
20. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
21. Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Keberhasilan dalam pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 dapat dicapai dikarenakan adanya:

1. Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan;
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja Tahun 2023 antara lain :

1. Minimnya SDM dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Kurang berfungsinya Satgas PPA dan Lembaga Perlindungan Anak terpadu yang Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di kelurahan/kecamatan dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan KIE terkait kesehatan reproduksi remaja, sehingga meningkatnya Angka Kelahiran remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19) jika dibandingkan tahun sebelumnya;

4. Belum optimalnya pemanfaatan kader PPKBD dan Sub PPKBD untuk menjaring akseptor KB.
5. Pelaksanaan kegiatan diawal tahun belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yaitu :

1. Peningkatan SDM khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan UPTD PPA;
2. Adanya dukungan anggaran untuk operasional Satgas PPA dan Lembaga Perlindungan Anak terpadu yang Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di kelurahan/kecamatan;
3. Mengoptimalkan Pelaksanaan KIE terkait kesehatan reproduksi remaja;
4. Pemanfaatan kader PPKBD dan Sub PPKBD secara optimal untuk menjaring akseptor KB terutama untuk KB MKJP.
5. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk pencapaian kinerja organisasi, Alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar Rp. 11.708.165.234 terealisasi sebesar Rp. 10.913.057.380,- atau sebesar 93,21%. Untuk realisasi anggaran pada Tahun 2023, ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 60%, adapun sub kegiatannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. (APBD)
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Pagu Anggaran : Rp. 115.000.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp. 55.560.437,- (48,31%)
 Penjelasan : Karena realisasi belanja listrik sesuai dengan pemakaian bulanan.
2. Program Perlindungan Perempuan
 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. (APBD)
 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp. 22.837.000,- (45,67%)
 Penjelasan : Dikarenakan keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana sehingga mengalami kesulitan untuk melaksanakan kegiatan.

3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. (APBD)
 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp. 3.284.500,- (32,85%)
 Penjelasan : Sebagian belanja dipersiapkan untuk acara verifikasi lapangan penilaian/ evaluasi pelaksanaan PUG, sedangkan pada tahun 2023 kementerian PPPA tidak melakukan verifikasi lapangan sehingga sebagian belanja tidak dicairkan.

2.3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, dalam hal ini untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengintegrasian kajian berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang secara umum dan dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu pada hasil telaahan terhadap RPD Kota Pangkalpinang 2024-2026, Renstra Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II Gambaran Pelayanan PD, dapatlah disusun isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Lembaga yang melaksanakan PPRG dan anggaran berbasis gender di Kota Pangkalpinang.
2. Masih kurangnya pegawai terutama pada UPTD PPPA.
3. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19). Tahun 2023 8,20 sedangkan Tahun 2023 15,15.
5. Belum Optimalnya Capaian Penggunaan Metode Kontrasepsi semua cara.
6. Meningkatnya Angka Total Fertility Rate (TFR). Tahun 2022 Capaiannya 1,98 sedangkan Tahun 2023 2,26.
7. Masih banyak masyarakat yang tidak ingin anak lagi dan menjarangkan umur anak tetapi tidak ingin br-KB dan Masih kurangnya minat masyarakat terhadap KB MKJP
8. Belum optimalnya peran kelembagaan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada beberapa Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dilakukan penyesuaian.

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kota pangkalpinang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota		Indeks kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	5.607.914.782	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota		Indeks kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	5.607.914.782	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69 Nilai				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69 Nilai		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100%	4.242.464.782	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100%	4.242.464.782	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	4.242.464.782	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	4.242.464.782	

	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	10%	30.059.000	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	10%	30.059.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pk.Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30.059.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pk.Pinang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30.059.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	468.938.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	468.938.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.149.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.149.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.459.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.459.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk.Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.199.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pk.Pinang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.199.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	90.704.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	90.704.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	88.967.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pk. Pinang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	88.967.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.459.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.459.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%	44.068.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100%	44.068.000	
	Pengadaan Mebel	Pk. Pinang	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	31 Unit	29.709.000	Pengadaan Mebel	Pk. Pinang	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	31 Unit	29.709.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.359.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.359.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	545.459.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pk. Pinang	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	545.459.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	125.459.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	125.459.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	420.000.000	

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	276.926.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	276.926.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pk. Pinang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.459.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	120.459.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pk. Pinang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	120.459.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	35.459.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	35.459.000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	90.549.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pk. Pinang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	90.549.000	
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD	2,43%	20.000.000	Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah Pada APBD	2,43%	20.000.000	
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Program PUG Pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis Gender Tingkat Kabupaten/ Kota	14 program	18.000.000	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	Jumlah Program PUG Pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis Gender Tingkat Kabupaten/ Kota	14 program	18.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaa n Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	18.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaa n Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	18.000.000	

	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	2.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	2.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	2.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	2.000.000	
III	Program Perlindungan Perempuan		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13,46 rasio	64.480.000	Program Perlindungan Perempuan		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	13,46 rasio	64.480.000	

	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Media Massa (cetak, elektronik) yang berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 media	17.700.000	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Media Massa (cetak, elektronik) yang berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 media	17.700.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	17.700.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	17.700.000	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100%	28.680.000	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100%	28.680.000	

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 orang	28.680.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 orang	28.680.000	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Pelatihan	20 organisasi	18.100.000	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	20 organisasi	18.100.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	18.100.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	18.100.000	
IV	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	40%	19.915.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	40%	19.915.000	

	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tersusunnya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	19.915.000	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tersusunnya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	19.915.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	19.915.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	19.915.000	
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	34%	38.745.000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	34%	38.745.000	
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Lembaga yang telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	25 Lembaga	38.745.000	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Lembaga yang telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	25 Lembaga	38.745.000	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	9.225.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	9.225.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.520.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.520.000	
VI	Program Perlindungan Khusus Anak		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0,39%	28.680.000	Program Perlindungan Khusus Anak		Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0,39%	28.680.000	

	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	100%	28.680.000	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	100%	28.680.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	28.680.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 orang	28.680.000	
VII	Program Administrasi Pemerintah Desa		Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik	100%	70.000.000	Program Administrasi Pemerintah Desa		Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik	100%	70.000.000	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		Persentase Kelurahan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	100%	70,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa		Persentase Kelurahan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	100%	70,000,000	

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	1 dokumen	70.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan	1 dokumen	70.000.000	
VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase LKK Aktif	100%	1.386.539.600	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase LKK Aktif	100%	1.386.539.600	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	100%	1.386.539.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	100%	1.386.539.600	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 lembaga	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pk. Pinang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 lembaga	60.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	50.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	50.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.276.539.600	Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerakan PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.276.539.600	

IX	Program Pengendalian Penduduk		Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	100%	39.800.000	Program Pengendalian Penduduk		Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	100%	39.800.000	
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	39.800.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	39.800.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	39.800.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	39.800.000	
X	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,2 kelahiran per 1000 WUS	144.714.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,2 kelahiran per 1000 WUS	144.714.000	

			Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%				Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%		
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	78,20%				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	78,20%		
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	7,58%				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	7,58%		

	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 laporan	31.020.000	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 laporan	31.020.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana Penyuluhan Bangsa Kencana	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	31.020.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana Penyuluhan Bangsa Kencana	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	31.020.000	
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 laporan	56.840.000	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 laporan	56.840.000	

	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 organisasi	56.840.000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 organisasi	56.840.000	
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,97%	29.500.000	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,97%	29.500.000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	29.500.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	29.500.000	

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah	55,58%	27.354.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah	55,58%	27.354.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pk. Pinang	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26 kampung	27.354.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pk. Pinang	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	26 kampung	27.354.000	
XI	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	100%	58.080.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	100%	58.080.000	

			Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	69,04%				Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	69,04%		
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,74%				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,74%		
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	21,2 rata-rata usia kawin	58.080.000	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 Tahun	21,2 rata-rata usia kawin	58.080.000	

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pk. Pinang	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	58.080.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pk. Pinang	Jumlah laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	58.080.000	
				TOTAL	7.478.868.382				TOTAL	7.478.868.382	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2019 – 2024, telah menetapkan Visi Presiden terpilih yaitu :

1. Mempercepat dan melanjutkan membangun infrastruktur.
Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta
3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.
Memangkas hambatan investasi
4. Reformasi Birokrasi.
 - Kecepatan melayani dan member izin
 - Menghapus pola pikir linear, monoton dan terjebak zona aman
 - Adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran
APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Telaah terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender
2. Meningkatnya Pembangunan Keluarga
Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
3. Mewujudkan Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik
Indikator : Persentase Kelurahan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
Indikator : Persentase Perempuan pada Lembaga Pemerintahan
2. Menurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
Indikator : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan
3. Meningkatnya Nilai KLA
Indikator : Predikat Kota Layak Anak
4. Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang
Indikator : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
5. Terwujudnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera
Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026**

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
Mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia			
	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender			
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender
				Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan
				Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
				Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran RPD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD
			Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga
				Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya good governance		Indeks Reformasi Birokrasi			
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat			
			Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik
				Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, seperti yang tergambarkan pada tabel berikut:

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pangkalpinang
Tahun 2024 – 2026**

Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (IKU) Perangkat Daerah	Definisi Operasional
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	
Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	Jumlah pekerja perempuan di Lembaga pemerintahan dibagi jumlah pekerja perempuan dikali 100
Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah korban perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100
Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	
Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	
Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Jumlah kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tahun berkenaan dibagi jumlah total kelurahan dikali 100
Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Jumlah kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera dibagi jumlah total kelurahan dikali 100

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2024-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana setiap tahunnya.

Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TC. 32

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Beserta Target Capaian Kinerja
Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	61,29	61,39	61,49	61,49
	Meningkatnya partisipasi perempuan pada Lembaga pemerintahan	Persentase perempuan pada Lembaga pemerintahan	%	20	22	24	24
	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,014	0,013	0,012	0,012
	Meningkatnya nilai KLA	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)	Nindya (701-800)
Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	56,93	56,97	57	57
	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per-wanita	2	2	2	2

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Mewujudkan kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik		Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	%	100	100	100	100
	Terwujudnya Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Persentase Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	%	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasinal atau lapangan.
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

3. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota

Sub Kegiatan :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.

- 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Kegiatan :

- 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota.

7. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

9. Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

- 1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan :
 - a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.

10. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan :
 - a. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana.

2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.

3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.

4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan :

1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 terlampir dalam Tabel T-C.33. di bawah ini.

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana dan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah		90 Nilai	5.607.914.782			90	5.758.243.432
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69 Nilai				69	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP		100%	4.242.464.782			100%	4.416.886.432
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pk. Pinang	30 Orang/Bulan	4.242.464.782	APBD		35 Orang/Bulan	4.416.886.432

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN		10%	30.059.000			10%	52.059.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pk.Pinang	1 paket	30.059.000	APBD		1 paket	52.059.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pk.Pinang	100%	468.938.000			100%	412.394.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	1 Paket	12.149.500	APBD		1 Paket	12.459.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	1 Paket	122.459.000	APBD		1 Paket	106.359.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pk.Pinang	1 paket	4.199.000	APBD		2 paket	6.199.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	5 Paket	90.704.500	APBD		10 Paket	72.459.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pk. Pinang	3 Paket	88.967.000	APBD		2 Paket	62.459.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pk. Pinang	1 Laporan	150.459.000	APBD		1 Laporan	152.459.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Pk. Pinang	100%	44.068.000			100%	48.068.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pk.Pinang	31 unit	29.709.000	APBD		13 unit	31.709.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pk.Pinang	1 unit	14.359.000	APBD		4 unit	16.359.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pk. Pinang	100%	545.459.000			100%	549.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pk. Pinang	4 Laporan	125.459.000	APBD		4 Laporan	127.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pk. Pinang	4 Laporan	420.000.000	APBD		4 Laporan	422.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Pk. Pinang	100%	276.926.000			100%	279.836.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pk. Pinang	1 Unit	30.459.000			1 Unit	32.459.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pk. Pinang	5 Unit	120.459.000	APBD		5 Unit	122.459.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pk. Pinang	102 Unit	35.459.000	APBD		60 Unit	32.459.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pk. Pinang	1 Unit	90.549.000	APBD		1 Unit	92.459.000
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD	Pk. Pinang	2,43%	20.000.000			2,40%	23.997.700

	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	14 program	18.000.000			14 program	19.997.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 Dokumen	18.000.000	APBD		1 Dokumen	19.997.700
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	100%	2.000.000			100%	4.000.000

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendamping Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	30 organisasi	2.000.000	APBD		30 organisasi	4.000.0000
III	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Pk. Pinang	13.46 rasio	64.480.000			13.46 rasio	76.174.250
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Pk. Pinang	2 Media	17.700.000	APBD		2 Media	22.000.000

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pk. Pinang	34 Perangkat Daerah	17.700.000	APBD		34 Perangkat Daerah	22.000.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Pk. Pinang	100%	28.680.000			100%	32.174.250
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Pk. Pinang	10 Orang	28.680.000			16 Orang	32.174.250

[illegible]

	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pk. Pinang	1 dokumen	19.915.000			1 dokumen	22.000.000
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	Pk. Pinang	34%	38.745.000			34%	73.999.600
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	Pk. Pinang	25 lembaga	38.745.000			20 lembaga	41.999.800
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Pk. Pinang	20 Organisasi	9.225.000	APBD		20 Organisasi	41.999.800

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 Dokumen	29.520.000	APBD		1 Dokumen	31.999.800
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Pk. Pinang	0.39%	28.680.000			0,39%	32.453.200
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	Pk. Pinang	100%	28.680.000			100%	32.453.200
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan	Pk. Pinang	10 Orang	28.680.000	APBD		29 Orang	32.453.200

VII	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik	Pk. Pinang	100%	70.000.000			100%	72.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pk. Pinang	100%	70.000.000			100%	72.000.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pk. Pinang	1 dokumen	70.000.000	APBD		1 dokumen	72.000.000
VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK Aktif	Pk. Pinang	100%	1.386.539.600	APBD		100%	1.416.000.000

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	Pk. Pinang	100%	1.386.539.600			100%	1.416.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pk. Pinang	252 Lembaga	60.000.000	APBD		252 Lembaga	62.000.000

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pk. Pinang	1 laporan	50.000.000	APBD		1 laporan	52.000.000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pk. Pinang	1 dokumen	1.276.539.600	APBD		1 dokumen	1.302.000.000
IX	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	Pk. Pinang	100%	39.800.000			100%	41.489.500
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pk. Pinang	1 laporan	39.800.000			1 laporan	41.489.500

	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pk. Pinang	1 laporan	39.800.000	APBD		1 dokumen	41.489.500
X	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Pk.Pinang	8.2 kelahiran per 1000 WUS	144.714.000			8,20 kelahiran per 1000 WUS	146.510.500
		Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Pk.Pinang	100%				100%	
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	Pk. Pinang	78,20%				78,20%	

		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	Pk. Pinang	7,58%				7,58%	
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pk.Pinang	1 Laporan	31.020.000	APBD		1 Laporan	82.510.500
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Pk. Pinang	1 laporan	31.020.000	APBD		1 laporan	82.510.500

	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pk. Pinang	1 laporan	56.840.000			7 unit	32.000.000
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pk. Pinang	7 organisasi	56.840.000	APBD		7 unit	32.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah	Pk. Pinang	55,58%	27.354.000				
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pk. Pinang	26 kampung	27.354.000				

	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pk. Pinang	18.97%	29.500.000			18.97%	32.000.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pk. Pinang	1 laporan	29.500.000	APBD		7 laporan	32.000.000
XI	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Pk.Pinang	83.74%	58.080.000			83.72%	62.000.000
		Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	Pk.Pinang	100%				100%	
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	Pk.Pinang	69.04%				66.66%	

	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Umur 25-49 tahun	Pk. Pinang	21,2 Rata-Rata Usia Kawin	58.080.000			21,3	62.000.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pk. Pinang	1 Laporan	58.080.000	APBD		1 Laporan	62.000.000
JUMLAH					7.478.868.382				7.723.868.182

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metode pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen Renja dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metode pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metode dan jadwal pelaksanaan.

Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

Informasi pagu indikatif bagi setiap Perangkat Daerah dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan kepada Perangkat Daerah. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Pagu indikatif Perangkat Daerah dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menyiapkan Rencana Kerja tahun 2025 seperti tabel T-C.34 berikut.

Tabel T-C.34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025**

No	Prioritas Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Organisasi	Jumlah Plafond
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/ Kota	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	90 Nilai	DPPPAKB	5.607.914.782
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69 Nilai	DPPPAKB	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100%	DPPPAKB	4.242.464.782
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	DPPPAKB	4.242.464.782
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya Pelanggaran Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat pelanggaran Disiplin ASN	10%	DPPPAKB	30.059.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	DPPPAKB	30.059.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	DPPPAKB	468.938.000

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	DPPPAKB	12.149.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	DPPPAKB	122.459.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	DPPPAKB	4.199.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	DPPPAKB	90.704.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	DPPPAKB	88.967.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	DPPPAKB	150.459.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	100%	DPPPAKB	44.068.000
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 unit	DPPPAKB	29.709.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 unit	DPPPAKB	14.359.000

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	DPPPAKB	545.459.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	DPPPAKB	125.459.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	DPPPAKB	420.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%	DPPPAKB	276.926.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	DPPPAKB	30.459.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	DPPPAKB	120.459.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	DPPPAKB	35.459.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	DPPPAKB	90.549.000
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Persentase ARG pada belanja langsung	Persentase ARG Organisasi Perangkat Daerah pada APBD	2,43%	DPPPAKB	20.000.000
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah Dievaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota	14 program	DPPPAKB	18.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	DPPPAKB	18.000.000
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota /Kota	100%	DPPPAKB	2.000.000

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	DPPPAKB	2.000.000
III	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	13,46 rasio	DPPPAKB	64.480.000
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Massa (Cetak, Elektronik) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PPA) Untuk Melakukan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 media	DPPPAKB	17.700.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	DPPPAKB	17.700.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100%	DPPPAKB	28.680.000

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 orang	DPPPAKB	28.680.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan	20 organisasi	DPPPAKB	18.100.000
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	DPPPAKB	18.100.000
IV	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya PPRG pada Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	40%	DPPPAKB	19.915.000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	DPPPAKB	19.915.000
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	DPPPAKB	19.915.000

V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terwujudnya Kota yang Memenuhi Hak-Hak Anak	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	34%	DPPPAKB	38.745.000
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Telah Memenuhi Standar Pemenuhan Hak Anak	25 Lembaga	DPPPAKB	38.745.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Perintahan, Non Pemintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	DPPPAKB	9.225.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	DPPPAKB	29.520.000
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	Terlaksananya Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,39%	DPPPAKB	28.680.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	100%	DPPPAKB	28.680.000

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan Layanan Pengaduan	10 orang	DPPPAKB	28.680.000
VII	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik	100%	DPPPAKB	70.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	DPPPAKB	70.000.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	DPPPAKB	70.000.000
VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKK Aktif	100%	DPPPAKB	1.386.539.600
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupate/Kota	Persentase LKK yang Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	100%	DPPPAKB	1.386.539.600

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 lembaga	DPPPAKB	60.000.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	DPPPAKB	50.000.000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	DPPPAKB	1.276.539.600
IX	Program Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Penyediaan Data Keluarga dan KB	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	100%	DPPPAKB	39.800.000
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	DPPPAKB	39.800.000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	DPPPAKB	39.800.000
X	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya ASFR 15-19 Tahun	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19	8.23 kelahiran per 1000 WUS	DPPPAKB	117.360.000

		Meningkatnya Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%	DPPPAKB	
		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	78,20%	DPPPAKB	
		Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UnMeet Need)	7,58%	DPPPAKB	
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	DPPPAKB	31.020.000
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 laporan	DPPPAKB	31.020.000
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1 laporan	DPPPAKB	56.840.000

	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7 organisasi	DPPPAKB	56.840.000
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,97%	DPPPAKB	29.500.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	DPPPAKB	29.500.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kesertaan Ber-KB Kabupaten/ Kota dengan Kesertaan Rendah	55,58%	DPPPAKB	27.354.000
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	26 kampung	DPPPAKB	27.354.000
XI	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,74%	DPPPAKB	58.080.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2024. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Secara garis besar, rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2025 memuat 11 (sebelas) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni kurang lebih sebesar Rp **7.478.868.382 (Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)** untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang.